

ARAH POLITIK PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA ABAD KE 21

M. Asep Rahmatullah

Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang
Asep.rahmatullah@unis.ac.id

Siti Munawati

Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang
st.munawati@unis.ac.id

Sugih Suryagalih

Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang
ajisatriagalih@gmail.com

Abstarct

The Political Direction of Islamic Education In the 21st century, history has noted that Islamic education in Indonesia has taken root since the entry of Islam into the archipelago, that Islamic education is perfectly upright and perfect is inseparable from the role of the sultans, scholars, and Muslims continues to try to carry out the study of science majors , discussion, writing in the context of jihad fi sabillilah tafaqohu fiddien for the glory of Islam. It is also supported by Islamic political policies that are very beneficial for the interests of the world of Islamic education. Since the destruction of the Caliphate of the Ottoman Turkish Islamic government and the destruction of the Islamic kingdoms in Indonesia and the world. Then the condition of Islamic education experienced ups and downs and the lack of support from the Indonesian government. Therefore, after Indonesia's independence and the increasingly open world of globalization and modernization, it is necessary to look for ideas and ideal forms that are integrally holistic for the world of Islamic education. As well as being able to influence the policies of the Indonesian government and master the political policies of 21st century Islamic education for the future of Indonesian Muslims.

Keyword : Islamic Politics, Islamic Education, The Direction of 21st Century Indonesian Islamic Education Politics

Abstark

Arah Politik Pendidikan Islam Abad ke 21, sejarah telah mencatat bahwa pendidikan Islam di Indonesia telah mengakar dari sejak masuknya Islam ke nusantara, pendidikan Islam tegak secara sempurna dan paripurna tidak lepas dari peranan para sultan, ulama, dan kaum muslimin yang terus berupaya melakukan kajian majlis ilmu, diskusi, menulis serta aktif dalam gerakan dakwah dan jihad fi sabillilah untuk kejayaan islam. Setelah menancapkan kekuasaan Islam, maka sistem pendidikan islam di topang oleh kebijakan politik Islam yang sangat menguntungkan bagi kepentingan dunia pendidikan Islam. Sejak kehancuran kekhalifahan pemerintahan Islam turki utsmani dan kehancuran kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dan dunia. Maka kondisi pendidikan Islam mengalami pasang surut kemunduran dan kurangnya dukungan pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, setelah Indonesia merdeka dan semakin terbukanya dunia globalisasi dan modernisasi, maka perlu mencari ide, dan format yang ideal secara integralistik holistik untuk dunia pendidikan Islam. Serta dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia dan menguasai kebijakan politik pendidikan Islam abad ke 21 untuk masa depan umat Islam bangsa Indonesia.

Kata kunci : Politik Islam , Pendidikan Islam, Arah Politik Pendidikan Islam Indonesia Abad Ke 2

A. PENDAHULUAN

Realitas sejarah Indonesia menunjukkan, bahwa umat Islam memiliki pengaruh besar dalam proses kehidupan keagamaan, kebangsaan dan kemanusiaan bagi seluruh rakyat Indonesia, bahkan peradaban dunia. Agama Islam yang dianut oleh masyarakat Indonesia hampir 90 persen di dominasi oleh kaum muslimin, walaupun umat Islam Indonesia sangat beragam, terbagi menjadi beberapa organisasi masyarakat (Ormas) islam yang bersifat keagamaan.

Oleh karena itu dinamika kehidupan yang diciptakan oleh-NYA akan terus berubah mengikuti perkembangan zamannya. Baik sejak proses penciptaan Nabi Adam dan Hawa, Kisah Ibrahim, Nuh, Musa dan Nabi Muhammad Saw. Dari catatan peristiwa sejarah Islam yang mudah kita telusuri jejak dan langkahnya adalah sejak Nabi Muhmmad Saw diangkat menjadi Rasul.

Ketika gerakan dakwah Islam di mekkah zaman jahiliah dengan sembunyi-sembunyi dari rumah Arqam bin abil arqam,¹ kemudian sampai dengan suksehi hijrah ke kota madinah, sehingga berhasil membentuk dasar-dasar negara Islam pertama. Dari madinah gerakan Dakwah Islam gencar ke seluruh pelosok dunia, dan disitulah sudah terjadi proses pembinaan dan pendidikan (Tarbiyah) terhadap orang yang baru saja masuk Islam.

Dan pada abad ke 7 agama Islam masuk ke bumi nusantara,² melalui proses panjang dakwah, kajian, pengajian baik secara formal maupun nor formal berhasil membentuk pendidikan formal dan semi formal di surau, masjid, madrasah dan majlis taklim serta pendiidkan non formal lainnya. Sehingga terbentuknya kerajaan Islam di bumi Indonesia. Itu semua tidak lepas dari

proses perjuangan dakwah pendidikan dan politik Islam yang sangat massif oleh para ulama, mujahid dakwah dan kaum muslimin.

Dan sejak kekhalfahan Turki Usmani hancur tahun 1924 M, maka pada abad ke 14 dan 15 terjadi kolonialisme dan imperialisme besar-besaran terhadap dunia dan negara Islam, berawal dari ekonomi perdagangan, PT VOC, EIC berhasil menguasai Indonesia, yang akhirnya lewat politik pecah belah dan balas budi umat Islam berhasil di hasut. Sehingga telah terjadi peperangan yang sengit dengan kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di nusantara.

Selanjutnya, pada masa penjajahan, umat Islam tidak mendapatkan tempat di hadapan kolonial. Maka dari itu, masyarakat pribumi, khususnya umat Islam bangsa Indonesia melakukan perlawanan dengan cara gerilya. Yang pada akhirnya dengan darah, air amata dan keringat para ulama, santri dan rakyat Indonesia berhasil merebut proklamasi kemerdekaan dari tangan penjajah.

Secara sunatullah, kehidupan akan terus berubah, siapa yang tidak mau berubah, maka ia akan tertinggal jauh dan bahkan punah tertelan zaman. Karena sesungguhnya perubahan itu adalah sesuatu yang abadi dan mutlak pasti selalu terjadi di belahan negara manapun, termasuk Indonesia yang mengalami kemerdekaan.

Setelah berakhirnya penjajahan yang cukup lama dan menguras energi, tibalah sa'atnya Indonesia bangkit dan merdeka. Setelah kemerdekaan Indonesia, pendidikan Islam mulai mendapatkan tempat di republik ini, dengan adanya kementrian agama, pendidikan Islam secara perlahan mulai bangkit dan diakui.

Sejak masa itu, Departemen Agama mengelola sepenuhnya Pendidikan Agama Islam. Namun, perhatian yang diberikan oleh Departemen Agama dalam

¹ Pendidikan Islam di era perdaban Modern, Sutrisno. Suyatno, hal. 3

² Sejarah Pedaban Islam, Badri Yatim, hal. 194

mengembangkan pendidikan Agama Islam di masa awal kemerdekaan mendapat tandatangan dari kekuatan nasionalis sekuler terutama di lembaga Badan Pekerja Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) saat sidang- sidang dalam merumuskan Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah tahun 1949-1950.

Pemerintah belum memposisikan pendidikan Agama Islam terintegrasi ke dalam sistem pendidikan nasional. Salah satu penyebabnya adalah selain masih kuatnya pengaruh zaman penjajahan Hindia Belanda dan Jepang di bidang pendidikan yang netral terhadap agama. Sikap pemerintah yang demikian tidak terpisahkan dari kondisi politik negara yang belum stabil dengan berbagai kepentingan yang memengaruhinya.

Secara politik, pada masa pemerintah Presiden Soekarno terjadi tarik-menarik antar kepentingan politik dan kekuatan kelompok nasionalis, kelompok agamis, dan kelompok nasionalis sekuler atau komunis dalam merumuskan berbagai kebijakan yang memberi arah ke mana negara dan bangsa ini dibawa. Karena kelompok komunis begitu sangat dekat dengan presiden soekarno dan mempengaruhi kebijakan.

Bahkan pada masa presiden soeharto ada kebijakan SKB Tiga menteri baik menteri agama, menteri pendidikan dan menteri dalam negeri untuk mengatur pendidikan agama Islam di seluruh Indonesia. Perbandingannya kementerian agama dan kementerian pendidikan (60:40 Ilmu Agama dan Umum), (30:70 Ilmu Agama dan Umum).

Dan salah satu faktor kemunduran pendidikan islam di indonesia adalah karena lemahnya penguatan tauhid dan penguasaan sains dalam Islam, karena adanya dikotomi dan konflik kepentingan politik dua lembaga, baik itu kementerian agama dan kementerian pendidikan. Sehingga

melahirkan sekulerisme dan kehancuran moral anak bangsa.

Menurut Eqbal Ahmad dan Pervez Hood Boy sebagaimana di kutip oleh Azra, ada tiga respon berbeda yang muncul, yaitu restorasionis, rekonstruksionis, dan pragmatis.³ Kalangan restorasionis berusaha mencari format idela masa lalu, sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi dan sahabat, tokohnya Maryam Jamilah. Menurutnya, jika kehadiran sains dan teknologi tidak dilandasi oleh nilai-nilai moral, hasilnya akan jauh.

Kalangan rekonstruksionis dan pragmatis cenderung memiliki pandangan yang sama dengan sains dan teknologi, karena agama Islam itu revolutif, progresif dan rasional, tokohnya dalah Sayyid Ahmad Khan dan Jamaluddin Al-Afgani.

B. REALITAS PENDIDIKAN ISLAM ABAD KE 21

Islam dalam perkembangan pendidikan Islam terutama pasca pemerintahan Orde Baru sejak tahun 1998 sampai saat ini yang dikenal sebagai sistem pemerintahan Era Reformasi melahirkan UU no 2 tahun 1989. Pada masa ini merupakan era baru dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia sebagai koreksi terhadap sistem pemerintahan dan pendidikan yang dibangun oleh pemerintah Orde Baru.

Gerakan reformasi yang dimotori oleh mahasiswa tahun 1998, pada prinsipnya, mengandung empat tuntutan yang hendak diwujudkan, yaitu: 1) demokrasi; 2) kebebasan berpendapat dan berbeda pendapat; 3) keterbukaan; dan 4) otonomi. Keempat prinsip tersebut merupakan reaktualisasi dari nilai-nilai budaya Indonesia sebagai cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 1945.

Pada abad ke 21, tantangan dunia Islam yang paling berat adalah politik

³ Pendidikan Islam di era perdaban , Modern, Sutrisno. Suyatno, hal. 21

demokrasi liberal dan ekonomi kapitalisme pemodal yang memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan dunia pendidikan Islam. Sadar ataupun tidak sadar agama akan selalu di awasi oleh kaum pemodal (Kapitalis), karena agama dianggap dapat memerankan peranan penting bagi arus perubahan dunia, baik di Indonesia maupun di negara lainnya.

Menurut penulis, ada beberapa agenda besar yang harus di waspadai oleh umat Islam bangsa Indonesia pada masa kini. Yaitu :

Pertama, Dikotomi pendidikan yang selalu menduakan antara pendidikan agama Islam dan umum, antara kementerian agama dan kementerian pendidikan kebudayaan nasional serta pendidikan tinggi. Antara RA, MI DAN SD, MTS DAN SMP, MA, MAN DAN SMA/SMK, dan PTAI DAN PT/UNIVERITAS.

TABEL TIGA KEMENTRIAN

Kementrian dalam	Kementrian Pendidikan	Kementrian Agama
Gubernur	Dindikbud Provinsi	Kanwil Provinsi
Kabupaten/ Kota	Dindikbud Kab/Kota	Kemenag Kab/Kota

Kedua, Perubahan Materi kurikulum pendidikan Islam yang di otak-atik, salah satunya materi dasar tauhid yang kurang di bahas secara utuh menyeluruh di sekolah. Selanjutnya materi sejarah peradaban Islam (siroh nabawiyah) yang berisi tentang peperangan pada masa Rasulullah, baik itu perang badar, uhud, khandaq, terus di curigai dan di fitnah sebagai agama radikal.

Padahal dalam catatan sejarah umat Islam, agama Islam tidak pernah memulai permusuhan, mengajak peperangan, dan

memerangi terlebih dahulu, tetapi umat Islam selalau di fitnah dan di lecehkan. Bagi kaum muslimin apabila di tantang perang oleh kaum kafirin, maka umat Islam harus siap berjihad membela agama dan kehormatannya.

Ketiga, isu-isu keagamaan dan SARA, baik isu suara adzan, jenggot, celana cingkrang, cadar dan jilbab terus menerus di cipta kondisikan, diproduksi dan di gemboskan dari dalam maupun luar Islam, yang selalu menyudutkan dan menjajah kaum muslimin di pertontonkan di dunia nyata dan maya. Seolah-olah Islam itu agama kuno yang harus di musiumkan serta penghambat ekonomi kapitalis dan neokolonialis.

Keempat, Agenda Radikalisme dan Terorisme dari orang-orang yang membenci Islam, yang seolah-olah menuduh Islam sebagai agama yang jahat, keras dan suka berbuat kerusakan. Sehingga citra Islam jelek dan negatif. Padahal, Islam tidak pernah seperti itu, karena kekerasan hanya di lakukan oleh orang-orang kafir, komunis, yahudi dan orang muslim yang di peralat oleh kepentingan tertentu. .

Kelima, Sekulerisme dari sejak dulu terus di gaungkan oleh para ilmuan orientalis dan kaum intelektual pragmatis yang sengaja di masukan ke dalam dunia pendidikan Islam baik di Indonesia dan di luar negeri. Baik di lembaga kementerian dan pendidikan tinggi Islam melalui pertukaran dosen dan pelajar, banyak dosen dan pelajar yang di cuci otaknya (Ghazul fikri).

Serta agenda infiltrasi lewat mata kuliah filsafat banyak mahasiswa-mahasiswi yang terjebak oleh pemahaman liberalistik dan sekuleristik yang memisahkan konsep antara agama dan negara, antara kehidupan individualistik pribadi kelompok sosial masyarakat serta kehidupan dunia maupun akhirat.

Keenam, Fanatik (kelompok, golongan organisasi masyarakat atau

Ashobiyah) yang melahirkan Perpecahan umat Islam yang sengaja di buat untuk memecah belah umat kaum muslimin. Melalui starategi politik pecah belah (Devide et impera) sesama organisasi masyarakat (Ormas) dan umat Islam mulai di adu domba untuk perang saudara. Salah satu dampak yang paling besar adalah dari pesta demokrasi lima tahunan. Sehingga umat / rakyat masih berseteru sebelum dan sesudah PILPRES 2019 yang akhirnya berlanjut di dunia maya dan nyata

Kelemahan tokoh ormas Islam dan politisi partai politik Islam belum mampu bersatu untuk kepentingan luas umat Islam bangsa Indonesia, dan khususnya dunia pendidikan Islam Indonesia. Para parpol masih rebutan kue kepentingan jangka pendek baik itu kursi parlemen mentri di eksekutif, legislative dan yudikatif. Serta juga proyek-proyek perusahaan swasta, dan dari pemerintah baik di pusat kementerian, daerah provinsi dan kabupaten kota hingga desa.

Oleh karena itu, harus ada seorang aktivis, cendekiawan, kiyai, ulama, umaro, dan politisi negarawan yang mampu menyatukan ormas islam dan umat Islam bangsa indonesia untuk kepentingan dunia pendidikan Islam Indonesia dan kebangkitan Islam Indonesia. Maka dari itu, perlu upaya kolektif kolegal dari seluruh masyarat Islam guna mencapai kesatuan dan persatuan Islam seindonesia dan dunia.

Ketujuh : Pengaruh asing, atau dunia luar negeri terhadap pendidikan Islam, dengan adanya UU 20/2003 Pasal 65 ayat (1) mengatakan bahwa: *"Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*. Pasal ini harus dihilangkan karena akan menyebabkan terjadinya invasi

dan bahkan imperialisme sistem pendidikan asing ke Indonesia.⁴

Sinyalemen ADB & Kemitraan (2004) yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki terlalu banyak peraturan yang berkualitas buruk, kurang menjamin (kemanfaatan, keadilan, dan kepastian), maka pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara partisipatif, transparan, inklusif, dan konsultatif dengan pihak-pihak berkepentingan di dalam dan di luar pemerintahan serta dilakukan penilaian atas dampak hukum pendidikan terhadap kemantaatan yang tentu saja harus lebih besar dari pada biaya

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode teori dasar yang menggunakan data dari bahan-bahan yaitu bersifat kepustakaan (library research) atau penelitian taksonomik (taksonomik reasearch). Yang dimana penulis membaca dan mempelajari buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan beberapa buku yang berkaitan dengan Politik Pendidikan Islam Abad Ke 21. Sedangkan sumber data sekundernya, yaitu buku-buku, jurnal, undang-undang, media berita, dan lain-lain yang membahas mengenai permasalahan judul yang diteliti. Langkah yang digunakan dalam pengolahan data dalam penelitian ini adalah langkah analisis deskriptif, yaitu langkah yang menggambarkan atau menguraikan suatu hal tentang permasalahan yang di teliti⁵

⁴ Undang-Undang dan peraturan Pemerintah RI tetang Pendidikan, Direktorat jenderal pendidikan islam departemen agama tahun 2006. Hal. 75

⁵ Format-format penelitian sosial, sanapiah faisal, hal. 1995, Raja grafindo

D.PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN ARAH POLITIK ISLAM INDONESIA ABAD KE 21

Pendidikan Islam merupakan proses pembelajaran yang dilakukan oleh manusia sepanjang masa dari keadaan lemah, kuat dan di lemahkan kembali. Baik dari proses janin kandungan, kelahiran bayi, remaja, pemuda, sampai dewasa dan beruban di wafatkan. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi :

“Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.” (QS 30 Ar-Rum, Ayat : 54)⁶

Dari ayat di atas sangat jelas bahwa manusia di ciptakan oleh Allah swt dari lemah, kuat menjadi lemah kembali, begitu pula dengan proses kehidupan pendidikan Islam, mulai dari Sekolah di tingkat PAUD, TK, RA, MIN, SDIT/SD, SMP/MTS, MA/MIN, SMA/SMK, sekolah tinggi, Institut, PTS, PTN dan UNIVERITAS.

Pendidikan Islam pada hakikatnya terintegrasi secara holistik dengan semua bidang disiplin ilmu lainnya, karena hakikatnya manusia itu makhluk yang butuh ilmu agama dan dunia. Karena pendidikan islam adalah suatu proses transformasi pembinaan yang terus berkelanjutan sampai dunia ini berakhir (Kiamat).

Pendidikan Islam serta upaya untuk mencapai itu semua itu memiliki hubungan interkoneksi dan simbiosis mutualisme dengan semua disiplin ilmu yang sangat strategis. Baik itu ilmu politik, ekonomi, sosial, bahasa, budaya, hukum, keamanan/pertahanan militer, pariwisata, pertanian dan pertambangan (IPOLEKSOSBUDHANKAMPARPER).

Oleh karena itu, semua jenis dan jenjang pendidikan di bawah naungan Kemenag harus diintegrasikan menjadi satu dengan Kemendikbud karena sistem pendidikan ganda yang seperti sekarang menyebabkan kesulitan dalam berkoordinasi, menyebabkan disintegrasi pendidikan nasional, dan menyulitkan arah politik pendidikan Indonesia.

Selanjutnya menurut Trilling, Bernie, & Charles Fadel (2010) menyatakan bahwa abad ke-21 membutuhkan tiga keterampilan utama, yaitu *learning and innovation skills, digital literacy skills, and career and life skills*. Abad ke-21 yang dipicu oleh kemajuan-kemajuan teknologi transportasi dan teknologi komunikasi (khususnya digital) menuntut kepemilikan *professional human resources, great global management, great global leadership*, dan teknologi yang mutakhir dan canggih. Internalisasi tuntutan global terhadap kebijakan domestik akibat persaingan dan komitmen global (*MDG, EFA, human right for education, education for sustainable development competency standards, world climate*, dan sebagainya) harus dilakukan.

Mega Trends (10 new directions transforming our lives) yang ditulis oleh John Naisbitt (1985) masih sangat berpengaruh terhadap pembangunan pendidikan, yaitu: *from industrial society to information society, from forced technology to high tech/ high touch, from national economy to world economy, from short term to long term, from centralization to decentralization, from institutional help to self-help, from representative democracy to participatory democracy, from hierarchies to networking, from north to south, and from either/or to multiple options*.

Kemajuan teknologi juga sangat berpengaruh terhadap pembangunan pendidikan, yaitu teknologi konstruksi, teknologi manufaktur teknologi transportasi, teknologi komunikasi, teknologi energi,

⁶ Qs Ar-Rum ayat 54. (Al-qur'an Digital)

teknologi bio, dan teknologi bahan. Saat ini dan ke depan, teknologi komunikasi paling berpengaruh terhadap pendidikan Indonesia.

Oleh karena itu, digitalisasi pendidikan (*e-education*) merupakan tantangan masa depan pendidikan nasional. *On line new student selection, e-curriculum, e-learning, e-library, eadministration*, dan sebagainya untuk tidak disebut semuanya, merupakan bagian-bagian *eeducation*.

Mengingat tugas pokok dan fungsi pendidikan Islam adalah memberi bekal dasar dan latihan- latihan yang dilakukan secara benar, maka tidak semua tuntutan abad ke-21 tersebut diakomodasi. Konsensus untuk mengakomodasi sebagian lingkungan strategis harus dicapai dan disinilah politik pendidikan Islam berperan dalam kebijakan yang berpihak kepada kepentingan dunia pendidikan Islam di abad ke 21.

E. KESIMPULAN

Politik pendidikan Islam memiliki peranan yang begitu besar terhadap kemajuan dunia pendidikan Islam di abad ke 21, meminjam istilah politik Islam menurut delian noer (1983)dan Maurice Duverger (1982: 24), politik merupakan segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat.

Oleh karena itu untuk mempengaruhi kebijakan dunia pendidikan, maka di perlukan dukungan arahan dan masukan yang konstruktif dan positif terhadap pemangku kepentingan di republic ini. Maka, disinilah perlu format yang ideal dan membumi untuk pembangunan dunia pendidikan Islam, serta langkah-langkah starategis yang efektif dan efisien untuk kemajuan dunia pendidikan Islam,

Sudah saatnya, umat Islam bangkit, bersatu dan maju untuk menguasai dunia

dengan ilmu pengetahuan dan sains. Karena dengan arah kebijakan politik pendidikan islam, agama Islam ini maju, berkembang dan memenangkan pertarungan. Sudah sa'atnya umat Islam menguasai arah kebijakan politik pendidikan Islam Indonesia, semoga terwujud untuk masa depan kepentingan masyarkat Islam dan dunia pendidikan islam Indonesia.

Maka hasil dan solusi yang di tawarkan oleh penulis untuk dunia politik pendidikan Islam adalah

1. Melakukan gerakan Dakwah amar ma'ruf nahyi mungkar, dan pembinaan secara berkelanjutan (Qs An-Nahl Ayat 125)
2. Konsep Pendidikan yang tertintegratif secara holistik (Qs Al-Alaq 1-5)
3. Memberikan Pencerdasan politik Islam dan Mempersatukan umat Islam bangsa Indonesia. (Qs Ali –Imran Ayat 103,104,105)
4. Mempengaruhi dan menguasai kebijakan pendidikan (Qs Yusuf Ayat 56), Qs An-nur ayat 55, (Qs Ali Imran Ayat 26)
5. Merubah sistem pendidikan sekuler, liberal dan kapitalistik.

Semoga dunia pendidikan Islam bangkit berkembang dan maju untuk membangun masa depan peradaban Islam bagi seluruh umat manusia

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahan digital
Asian Development Bank & Kemitraan. 2004. *Laporan Penilaian Tata Pemerintahan Negara*. Jakarta: Asian Development Bank. BPS, Bappenas & UNDP. 2004.
Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, Rajawali Grafindo, Jakarta, tahun 2010
Breuning Marijke dan Ishiyama John, Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad Ke 21, Jakarta tahun 2013, Kencana.

Chomsky noam, How The World Works, Sleman, 2015, PT Bentang Pustaka

Indonesia Human Development Report 2004 (The Economics of Democracy: Financing Human Development in Indonesia). Jakarta: BPS, Bappenas & UNDP.

Kemenristekdikti, Pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi, Jakarta tahun 2016

Kementerian Pendidikan Nasional. 2010. *Sistem Pendidikan dan Ujian Nasional di 13 Negara*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.

Sanapiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan aplikasi. Raja grafindo. Jakarta, hal. 1995,

Sri-Edi Swasono. 2012. *Pendidikan Nasional dan Pembangunan Karakter Bangsa*. Jakarta: Bappenas.

Sutrisno, Pendidikan Islam di era Peradaban Modern 2015. Jakarta. PT KENCANA

Trilling, Bernie & Charles Fadel. 2010. *21st Century Skills: Learning for Life in Our Times*. San Francisco, CA: John Wiley & ons, Inc.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen 2002).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33).Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.